KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS PRIVASI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Eko Wahyono¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

Abstraksi :

Kebijakan pemerintah mengatur identitas warga negara Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) selalu mengalami perubahan yang kemudian dikenal dengan E-KTP yaitu KTP elektronik, perubahan ini sebagai strategi pemerintah untuk mendapatkan data kependudukan yang akurat dan benar. Dalam proses layanan E-KTP dikenal dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dalam proses sistem tersebut terhimpun data kependudukan di seluruh wilayah negara Indonesia.

Melalui sistem tersebut identitas penduduk akan tercatat dengan akurat dan baik, yang secara privat melekat pada diri penduduk yang timbul sejak lahir, yang ditandai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka dengan NIK tersebut kemungkinan terjadi data ganda terhindarkan, artinya seorang tidak akan tercatat kembali dalam satu sistem kependudukan. Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 28 Tahun 2005, yang kemudian di tiap-tiap daerah Kabupaten dan Kota di terbitkan Peraturan Daerah.

Dengan diberlakukannya SIAK apakah dapat menimbulkan kesadaran bagi warga negara Indonesia untuk memenuhi data kependudukan secara lengkap dan benar.

Kata Kunci : identitas, sistem, kepastian hukum, kependudukan

Abstraction :

Government policies set the identity of a citizen of Indonesia in the form of Identity Card (KTP) always changes that became known as the E-KTP is KTP elektronik, this changes as the government's strategy to obtain accurate data population and valid. In the process of e-KTP card service known as Information Systems Administration (SIAK) are in the process of the system of population data collected throughout the territory of Indonesia.

Through the system of KTP will be recorded accurately and well, which was privately inherent in population arising from birth, which is marked by the Population Identification Number (VIN), then by NIK the possibility of duplicate data is inevitable, it means a not recorded back in a settlement system. Information systems Administration (SIAK) is regulated in Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration followed up by Government Regulation No. 37 Year 2007 on Implementation of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration, and issued Government Regulation No. 25 Year 2008 on Regulation and Registration Procedures for Population and Civil Registration. Regulation of the Minister of Home Affairs Number. 28 of 2005, which was then in each District and City published regional regulations.

With the enactment SIAK whether to raise awareness for Indonesian citizens to meet the demographic data is complete and valid.

Keywords: identity, system, rule of law, demography

¹ *Alamat korespondensi* : Eko.wahyono@upm.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

(1) Pendahuluan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai wujud salah satu kebijakan pemerintah terhadap masalah data identitas penduduk di Indonesia, identitas penduduk sering dilakukan dalam aktivitas individu penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan yang berlaku berdasar peraturan perundang-undangan telah memasuki era baru disebut E-KTP (KTP elektronik).

Secara khusus penerapan administrasi kependudukan yang lebih tertib dan terpadu serta universal, permanen yang berkelanjutan disediakan pusat data dan informasi mengenai pendaftaran, pencatatan penduduk secara akurat, lengkap, mutakhir yang mudah diakses sebagai acuan untuk perumusan kebijakan pendataan penduduk.

Pengelolaan identitas penduduk bertujuan untuk membuat masyarakat nyaman dan aman bertempat tinggal di suatu kawasan di seluruh wilayah Indonesia, maka dengan semakin tingginya jumlah pertumbuhan penduduk dan semakin padatnya pemukiman akan mempengaruhi terhadap kondisi data penduduk, mengenai tingkat pengangguran, sosial budaya dan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 28 Tahun 2005 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota se Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan administrasi kependudukan, merupakan suatu tonggak yang sangat penting untuk memulai pengelolaan kependudukan lebih profesional.

Administrasi kependudukan sebagai suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan diperlukan suatu legalitas yang pasti, maka untuk memenuhi hal tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, dan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyarat dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 28 Tahun 2005

Dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut pendataan dan pengelolaan kependudukan diharapkan dapat dikelola semakin lebih tertib dan dijamin legalitas penduduk, menjamin perlindungan bagi penduduk, terjamin keakuratan data penduduk, sehingga peristiwa kependudukan akan tercatat dan dikelola secara pasti, mulai kelahiran sampai kematian seorang penduduk.

Bagaimanapun baiknya manajemen pengelolaan kependudukan, jika tidak diimbangi dengan kesadaran warga masyarakat terhadap tertibnya administrasi kependudukan, maka manajemen pengelolaan kependudukan tidak akan berhasil, oleh karena itu salah satu bentuk pengelolaan kependudukan adalah dengan cara memberikan pencerahan layanan kepada warga masyarakat agar melaksanakan tertib administrasi kependudukan dengan implementasinya yaitu warga masyarakat yang akan mengurus administrasi kependudukan secara langsung tanpa melalui jasa dari pihak manapun, selain itu secara periodik dilakukan razia Kartu Tanda Pengenal (KTP) ditempat yang dianggap berpotensi terjadinya pelanggaran.

Secara bertahap pembenahan sistem pengelolaan administrasi kependudukan selalu ditingkatkan, guna menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, maka peningkatan pengelolaan tersebut pemerintah melakukan suatu cara yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mengharuskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, dengan diterbitkannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing orang tidak akan sama sampai pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) meninggal dunia.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) sangat bermanfaat jika dilaksanakan secara *on line* di seluruh wilayah Indonesia, akan memberikan kemudahan bagi setiap penduduk yang melakukan pindah tempat tinggal, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara cepat dan tepat akan diketahui identitasnya dan kebenarannya, karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara *on line* data penduduk dikelola secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri.

Dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi penduduk di setiap wilayah, secara otomatis akan terjadi banyak perubahan tatanan, aturan seperti Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati/Walikota. Maka dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) secara serentak di seluruh wilayah Indonesia niscaya akan menjadi suatu jembatan untuk mencapai kemajuan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) bisa dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan lembaga pemerintah seperti yang berkaitan dengan Pajak dan Bea Cukai, Imigrasi, Kantor Urusan Agama, Pertanahan, BIN, BNN, Kepolisian, Kesehatan, Transmigrasi, KPU, BKKBN, Perbankan.

2. Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Dengan **rumusan masalah** sebagai berikut yaitu : Bagaimanakah Kepastian Hukum Terhadap Pengelolaan Status Privasi Warga Negara Indonesia Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) ?

Adapun **tujuan** dari penelitian ini adalah memberikan Kepastian Hukum Terhadap Pengelolaan Status Privasi Warga Negara Indonesia Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)

B. Metode Penulisan.

Penulisan proseding ini didasarkan kajian analisa normatif pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang undangan lainnya, juga

kajian secara analisis sosiologis yang berkaitan dengan implementasi undang undang serta tanggapan masyarakat terhadap manfaat pelaksanaan undang undang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Penduduk.

Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap warga negaranya, disamping itu negara juga berkewajiban memberikan kesejahteraan dan memfasilitasi hak penduduk untuk berkomunikasi, memperoleh informasi bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya.

Menurut pemahaman secara umum pengertian penduduk adalah warga negara yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara, apakah sejak lahir ataupun bersifat sementara seperti orang asing yang mempunyai kegiatan di wilayah negara yang ditempati.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan yang dimaksud warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia dan yang dimaksud orang asing adalah orang yang warga negara Indonesia.

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk, data kependudukan sebagai data yang awal untuk dikelola dan dikembangkan, guna mengetahui tingkat perkembangan penduduk dari waktu ke waktu.

Dari pengertian penduduk sesuai dengan uraian tersebut diatas bahwa yang disebut penduduk Indonesia adalah mereka yang telah tercatat secara sah pada lembaga pencatat kependudukan, apakah yang lahir di Indonesia

atau yang tidak lahir di Indonesia, penduduk Indonesia tidak berdasarkan lahirnya tetapi berdasarkan pencacatan yang sah menurut undang-undang pada lembaga pencatat kependudukan.

2. Pendaftaran Penduduk

Indonesia tercatat negara yang memiliki penduduk yang jumlah tinggi, berada pada wilayah yang luas dan bertempat tinggal di berbagai pulau, yang beraneka ragam sosial budaya, suku, bahasa daerah, serta tingkat pendidikan yang rata-rata pada tingkat menengah atas, sehingga akan mempengaruhi tingkat perilaku dalam pemahaman dan kesadaran hukum.

Keanekaragaman penduduk Indonesia merupakan modal dan dinamikan sosial masyarakat yang indah, dengan keanekaragaman tersebut negara mengelola dengan menerbitkan berbagai peraturan perundangan guna melindungi warga negaranya dan memberikan kepastian hukum yang adil dan seimbang. Setiap orang diwajibkan untuk mendaftarkan diri agar dapat diakui sebagai penduduk Indonesia di seluruh wilayah negara Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 4 ayat (1) (2) (3) yaitu :

- (1) Penduduk warga negara Indonesia wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal wajib melapor kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran data base kependudukan.

Lebih lanjut diatur dalam pasal 5 ayat (1) (2) (3) dan (4) yaitu :

- (2) Pencatatan biodata penduduk warga negara Indonesia sebagaimana di

maksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. Surat pengantar dari RT dan RW.
 - b. Dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain :
 1. Kutipan Akta Kelahiran.
 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar
 3. Kartu Keluarga
 4. Kartu Tanda Penduduk
 5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah atau
 6. Kutipan Akta Perceraian.
 - c. Surat keterangan Kepala Suku/Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.
- (2) Pencatatan biodata kependudukan bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Paspor atau
 - b. Dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Paspor.
 - b. Kartu izin tinggal terbatas.
 - c. Buku pengawasan orang asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Paspor.
 - b. Kartu izin tinggal tetap.
 - c. Buku pengawasan orang asing.

Dalam pasal 6 ayat (1) (2) (3) (4) diatur sebagai berikut :

- (1) Penduduk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa

- persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di desa/ke-lurahan dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk warga ne-gara Indonesia.
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam bu-ku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - c. Petugas registrasi melakukan verifi-kasi dan validasi data penduduk.
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir biodata penduduk.
 - e. Petugas registrasi menyampaikan for-mulir biodata penduduk kepada Ca-mat.
 - (3) Pencatatan biodata penduduk di kecama-tan dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifi-kasi dan validasi data penduduk.
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk.
 - c. Petugas registrasi menyampaikan for-mulir biodata penduduk kepada ins-tansi pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata pendu-duk.
 - (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk warga negara Indonesia oleh instansi pe-laksana, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifi-kasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke da-lam data base kependudukan untuk mendapatkan NIK.
 - b. Kepala instansi pelaksana menerbit-kan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang ber-sangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Ke-pendudukan.

3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan bagian legalitas identitas seseorang warga ne-

gara yang berdomisili pada suatu wilayah di In-donesia, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah bagian yang sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia, dengan Kartu Tanda Pendu-duk (KTP) akan dapat diketahui bahwa yang bersangkutan berdomisili dimana atau sebagai penduduk di wilayah mana di negara Indonesia

Dengan diterbitkannya Kartu Tanda Pen-duduk (KTP) bagi setiap warga negara Indo-nesia dimaksudkan untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemiliknya. Maka berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil se-bagaimana tersebut dalam pasal 15 ayat (1), (2) diatur sebagai berikut :

- (3) Penerbitan KTP baru bagi pendudukwarga negara Indonesia, dilakukan setelah me-menuhi syarat berupa :
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
 - b. Surat pengantar RT/RW dan Kepala De-sa/Lurah
 - c. Foto kopi :
 1. KK
 2. Kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tu-juh belas) tahun
 3. Kutipan akta kelahiran
 - d. Surat keterangan datang dari Luar Ne-geri yang diterbitkan oleh instansi pelak-sana bagi warga negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
 - b. Foto kopi :
 1. KK
 2. Kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
 3. Kutipan akta kelahiran
 - c. Paspor dan izin tinggal tetap dan

d. Surat keterangan catatan Kepolisian

Setiap penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan warga negara Indonesia didalamnya terkandung kewajiban, yaitu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Maka setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi pelaksana. Bagi warga asing berkewajiban melaporkan identitas diri beserta keluarganya.

Dengan demikian pengelolaan data kependudukan akan semakin banyak tantangan dan permasalahan, bilamana tidak tertangani dengan baik, maka setiap warga masyarakat akan terdata atau tercatat dengan benar.

4. Pengembangan Manajemen.

Secara realitas dalam dalam suatu negara pengelolaan data penduduk akan selalu berhubungan dengan manajemen, demikian pula dalam pengelolaan kependudukan di negara Indonesia juga berhubungan manajemen, karena dengan manajemen segala hal akan tertata secara terarah dan sistimatis, maka pengelolaan data penduduk akan tepat, benar dan tersimpan dalam suatu tempat yang aman oleh instansi atau lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan.

Dengan pripsip-pripsip manajemen membuat lebih mudah bagi setiap orang untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Sebagai ilmu pengetahuan manajemen bersifat universal didalamnya terdapat kerangka yang sistimatis mencakup antara lain kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut **T. Hani Handoko** (1986 : 6) menjelaskan mengenai manajemen yaitu :

“Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit, ada tiga alasan utama diperlukan manajemen yaitu :

1. **Untuk mencapai tujuan.** Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. **Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.** Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, ossosiasi perdagangan, masyarakat dan pemerintah.
3. **Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.** Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satunya cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas”.

Lebih lanjut tentang di jelaskan oleh **Peter F. Drucker** (1964 : 5) menjelaskan bahwa :

“efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar”.

Manajemen dalam pelaksanaan tugas sangat diperlukan, agar tercapainya tujuan secara efisien dan efektif, dengan manajemen seluruh tugas dalam suatu organisasi akan dapat dengan mudah untuk dicapai.

Dalam hal menjalankan suatu perkejaan yang lebih kompleks yang mencakup aspek-aspek penting dalam pengelolaan, selanjutnya **Stoner** (1982 : 8) mengemukakan sebagai berikut :

“Manajemen adalah proses perencanaan, penorganisasian, pengaharan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Dari pendapat para ahli manajemen tersebut akan memberikan suatu gambaran yang konkrit bagi para pelaku dalam institusi pemerintah khususnya dalam pengelolaan administrasi kependudukan, agar segala aktivitas yang dilakukan dapat memberikan hasil yang tepat sesuai tujuan yang telah diharapkan dan ditetapkan. Dengan semakin kompleksnya dan dinamika perilaku warga dalam lingkungan masyarakat, perlu diimbangi dengan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pemerintah untuk melindungi, mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik ke masa depan.

Dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan yang telah diaplikasi oleh pemerintah daerah, dan pendekatan teori ini dapat sebagai acuan pendekatan ilmiah sebagai perimbangan antara ilmu pengetahuan dan praktek. Maka data penduduk di seluruh wilayah negara Indonesia terhimpun di Kementerian Dalam Negeri.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi sangat bermanfaat untuk pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam era globalisasi saat ini, dengan derasnya sistem informasi akan menghadapi berbagai tantangan, menurut hasil kajian penulis paling tidak ada 12 (dua belas) tantangan utama yang membenteng antara lain :

1. Ketahanan pangan.
2. Ketahanan energi.
3. Ketahanan air bersih.
4. Kelestarian lingkungan hidup.
5. Bencana alam.
6. Pendidikan.
7. Kesehatan.
8. Transportasi.
9. Pertanian, industri dan jasa.
10. Pertanahan.
11. Teknologi, komunikasi dan informasi (ICT)
12. Pelaksanaan *good governance*.

Upaya untuk menjawab tantangan tersebut, yang bersifat strategis adalah pembenahan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

a. Hak Privasi Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)

Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) mencantumkan identitas diri setiap warga negara Indonesia, dengan di terapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) semestinya sudah tidak lagi mencantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) seperti tempat tanggal lahir, alamat, agama, status kawin, karena telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), maka yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) cukup Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, foto, sidik jari dan tanda tangan pemegang E-KTP.

Dengan perkembangan teknologi setiap warga negara Indonesia yang berhubungan dengan institusi pemerintah dapat diakses melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan demikian hak privasi setiap warga negara atau penduduk tidak perlu di ketahui secara umum, jika institusi menginginkan data lengkap setiap warga negara atau penduduk dapat membuka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Setiap warga negara atau penduduk yang telah memiliki E-KTP yang secara resmi di terbitkan oleh institusi pemerintah yang berwenang menerbitkan, maka dapat diyakini bahwa KTP tersebut benar dan dapat di pertanggungjawabkan keasliannya. Apabila terjadi pemalsuan akan dapat diketahui, demikian pula yang memiliki KTP ganda,

b. Kebijakan Administrasi Yang Merugikan Rakyat.

Kebijakan administrasi dalam negara demokrasi mengandung arti bahwa kebijakan yang diambil demi kepentingan dan keuntungan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (pelaku negara). Oleh karena itu, dalam negara demokrasi selalu menjadi persoalan apabila ada satu rakyat atau beberapa rakyat atau seke-lompok

rakyat yang dirugikan oleh kebijakan administrasi. Jika hal ini terjadi, maka dengan segera harus diidentifikasi apa penyebabnya. Penyebabnya pada dasarnya dapat bersumber pada dua kategori perbuatan, yaitu perbuatan administrasi yang melanggar hukum dan perbuatan administrasi yang sah (tidak melanggar hukum).

Jika kebijakan administrasi itu termasuk kategori perbuatan melanggar hukum, maka ganti rugi yang wajib dibayar oleh administrasi yang berkaitan dengan pemerintah negara berdasarkan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum dengan segala konsekuensi administrasinya terhadap penjamin administrator pelaku atau pengambil kebijakan. Sebaliknya jika kebijakan itu adalah sah, berdasarkan pada hukum, maka ganti rugi yang wajib dibayar adalah “ganti rugi karena perbuatan yang sah”. Jadi, kebijakan yang sah maupun kebijakan yang melanggar hukum, jika menimbulkan kerugian terhadap rakyat, administrasi pemerintah negara wajib membayar ganti rugi.

Oleh karena itu, dalam negara demokrasi persoalan menggugat pemerintah negara di hadapan pengadilan adalah per soal biasa. Menggugat administrasi yang berkaitan dengan pemerintah negara bukan persoalan salah atau tidak salahnya administrasi, yang menjadi persoalan utama bagi rakyat adalah haknya sebagai pemegang kedaulatan dan pelaku negara untuk tidak dirugikan, karena keberadaan negara untuk kepentingan rakyat.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam suatu negara demokrasi menanggung risiko pembiayaan demi eksistensi negara serta demi kepentingan rakyat termasuk risiko kerugian akibat perbuatan aparatur negara dalam menjalankan fungsinya, termasuk pembayaran ganti rugi yang diderita rakyat.

Dalam konsep negara demokrasi tidaklah sepatutnya rakyat di korbankan demi kepentingan dan keuntungan bersama. Jika hal itu untuk kepentingan atau keuntungan bersama rakyat, maka seharusnya ditanggung bersama. Hanya dalam konsep negara modern fasis ala Jer-

man individu harus mengalah dan dikorbankan demi kepentingan bersama.

Hak asasi, yaitu suatu hak keseluruhan yang dilekatkan pada eksistensi warga masyarakat untuk memberikan identitas istimewa yang absolut tertentu, yaitu identitas hak dasar tertentu, selama waktu tertentu di atas tempat tertentu. Dengan kata lain, hak asasi adalah hak penentu identitas dasar warga masyarakat yaitu hak yang secara absolut menentukan identitas dasar, yang senantiasa dinamis menurut perkembangan waktu dan tempat adalah identitas faktual hak warga masyarakat.

Identitas dan tipe dasar hak asasi adalah secara teoretis tidak dapat dirubah sepanjang waktu di seluruh tempat. Hak asasi warga masyarakat dimuat dalam asas hukum konstitusi negara dan dapat dinamakan asas hukum fundamental original konstitusional. Asas hukum yang memuat hak asasi mengenai eksistensi warga masyarakat yang original dimuat dalam konstitusi negara (hukum konstitusional). Oleh karena itu disebut “fundamental”, karena ia penentu identitas warga negara.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bagian pertama yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat” adalah hukum asasi konstitusional penentu identitas negara. Jika hukum ini diubah, sehingga kedaulatan tidak lagi berada dalam tangan rakyat, maka negara berubah pula menjadi negara yang bukan negara demokrasi. Oleh karena itu, bagian pasal ini tidak boleh diubah demi kelestarian identitas warga negara sebagai negara demokrasi.

C. Kesimpulan

Tentang hak asasi sebagai penentu identitas bagi negara kita serta tipe negaranya berkenaan dengan eksistensi komponen yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”. Hak asasi dalam negara kita adalah “Pancasila”, yang menjadi pusat perhatian dan dipandang sebagai satu-satunya materi hukum hak asasi identitas warga Negara. Hak asasi penentu identitas negara dan eksistensi fungsional negara dilihat dari

segi ekstrim bulat menyeluruh fungsional adalah “merdeka”. Ini adalah suatu deskripsi tentang identitas dasar hukum.

Dengan demikian hak privasi warga negara harus dilindungi oleh negara berdasarkan konstitusi, yang tidak semestinya dibuka secara umum dalam identitas E-KTP, karena hak tersebut melekat dalam jati diri setiap warga masyarakat, dan tidak perlu dicantumkan dalam E-KTP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gadjong Andi, Agussalim, (2007), *Pemerintah Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Hartono Dimiyati, (2010), *Memahami Makna Pembukaan UUD 1945 Dari Sudut Historis, Idiologis, Dan Konsep Nasional*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Magnis Suseno Franz, (1997), *Mencari sosok Demokrasi, Sebuah telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Sukardja Ahmad, (2012), *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Tentang dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: PT Sinar Grafika

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyarat dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.